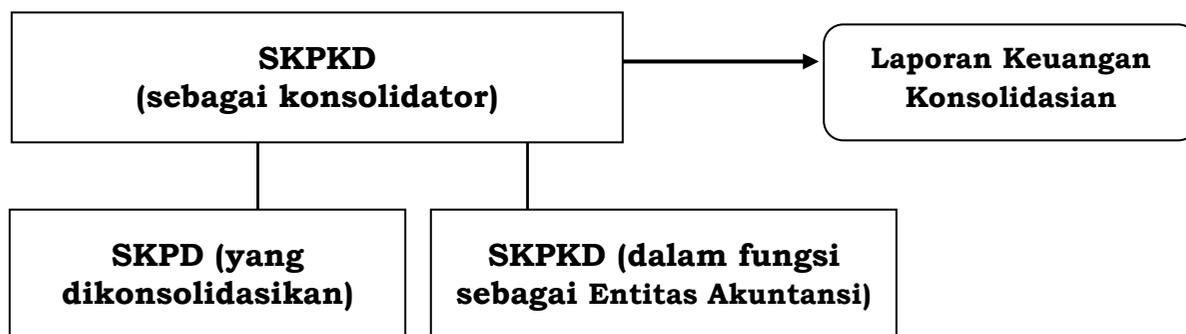


LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 91 TAHUN 2021
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

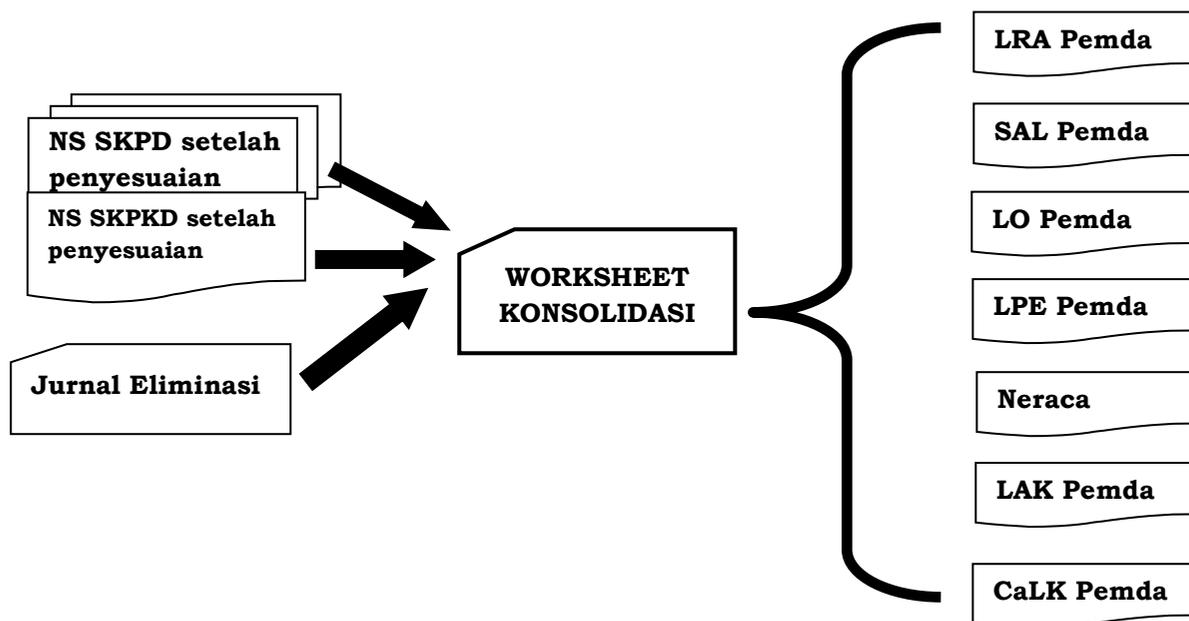
A. UMUM.

Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPKD dan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal yaitu laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.



Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu:

1. tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasi; dan
2. tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.



B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI.

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD.

Kode Akun	Nama Akun	Lap. Keu SKPD A		Lap. Keu SKPD B		Lap. Keu SKPD dst.		Lap. Keu SKPKD		Jurnal Eliminasi		Lap. Keu Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu:

1. menyusun *worksheet* LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 4, 5, 6 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN;
2. menyusun *worksheet* LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 7 dan 8 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN; dan
3. Menyusun *worksheet* Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 1, 2, dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

No	Uraian	SKPD1		SKPD2		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	PENDAPATAN								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx		xxx				xxx	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					xxx		xxx	
6	Lain-lain PAD yang sah					xxx		xxx	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx		xxx		xxx		xxx	
8	Pendapatan Transfer					xxx		xxx	
9	Lain-lain Pendapatan yang Sah					xxx		xxx	
10	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
11	Belanja								
12	Belanja Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Belanja Modal	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Belanja Tak Terduga					xxx		xxx	
15	Jumlah Belanja	xxx		xxx		xxx		xxx	
16	Transfer					xxx		xxx	
17	Jumlah Belanja dan Transfer	xxx		xxx		xxx		xxx	

No	Uraian	SKPD1		SKPD2		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
18	Surplus/defisit-LRA	xxx		xxx		xxx		xxx	
19	Pembiayaan Daerah								
20	Penerimaan Pembiayaan					xxx		xxx	
21	Pengeluaran Pembiayaan					xxx		xxx	
22	Pembiayaan Netto					xxx		xxx	
23	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan					xxx		xxx	
24	(SILPA)/SIKPA								

WORKSHEET LO GABUNGAN

No.	Uraian	SKPD1		SKPD2		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	KEGIATAN OPERASIONAL								
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah	xxx		xxx				xxx	
3	Pendapatan Transfer	xxx		xxx				xxx	
6	Lain-lain Pendapatan yang sah					xxx		xxx	
7	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
8	Dana perimbangan/Transfer					xxx		xxx	
9	Lain-lain pendapatan yang sah					xxx		xxx	
10	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
11	Beban								
12	Beban Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Beban Transfer	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Beban Lain-lain	xxx		xxx		xxx		xxx	
15	Surplus/Defisit dari Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
16	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	xxx		xxx		xxx		xxx	
17	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa								
18	Pos Luar Biasa								
19	Surplus/Defisit LO								

WORKSHEET NERACA GABUNGAN

No.	Uraian	SKPD 1,2, ...		SKPKD		Eliminasi		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Aset								
2	Aset Lancar								
3	Kas di Kas Daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx		xxx				xxx	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		xxx				xxx	
6	Investasi Jangka Pendek	xxx		xxx				xxx	
7	Piutang Pajak	xxx						xxx	
8	Piutang Retribusi			xxx				xxx	
9	Penyisihan Piutang	xxx		xxx				xxx	
10	Belanja Dibayar Dimuka			xxx				xxx	
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara			xxx				xxx	
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx		xxx				xxx	
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			xxx				xxx	
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			xxx				xxx	
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			xxx				xxx	
16	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi			xxx				xxx	
17	Piutang Lainnya			xxx				xxx	
18	Persediaan	xxx		xxx				xxx	
19	Jumlah aset lancar	xxx		xxx				xxx	
20	Inventasi Jangka Panjang	xxx		xxx				xxx	
21	Aset Tetap								
23	Tanah	xxx		xxx				xxx	
24	Peralatan dan mesin	xxx		xxx				xxx	
25	Gedung dan bangunan	xxx		xxx				xxx	
26	Jalan, irigasi, dan jaringan	xxx		xxx				xxx	
27	Aset tetap lainnya	xxx		xxx				xxx	
28	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		xxx				xxx	
29	Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)		(xxx)				
30	Dana cadangan		xxx		xxx				
31	Aset lainnya	xxx		xxx				xxx	
32	RK-SKPD	xxx		(xxx)					
33	Jumlah Aset	xxx		xxx				xxx	
34	Kewajiban	xxx		xxx				xxx	
35	Ekuitas			xxx				xxx	
	- Ekuitas								
	- SAL								
36	RK-PPKD					(xxx)			
37	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx		xxx				xxx	

C. JURNAL ELIMINASI.

Jurnal eliminasi dibuat oleh entitas yang memiliki fungsi konsolidasi. Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK-SKPD yang merupakan akun *reciprocal* yang bersifat sementara di tingkat pemerintah daerah (entitas pelaporan). Akun ini akan dieliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun *reciprocal* tersebut, baik di SKPD maupun di PPKD sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca PPKD tetap hidup.

Untuk mengeliminasi akun *reciprocal* ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debit dan RK-SKPD di Kredit.

Uraian	Debit	Kredit
RK-PPKD	XXX	
RK-SKPD		XXX

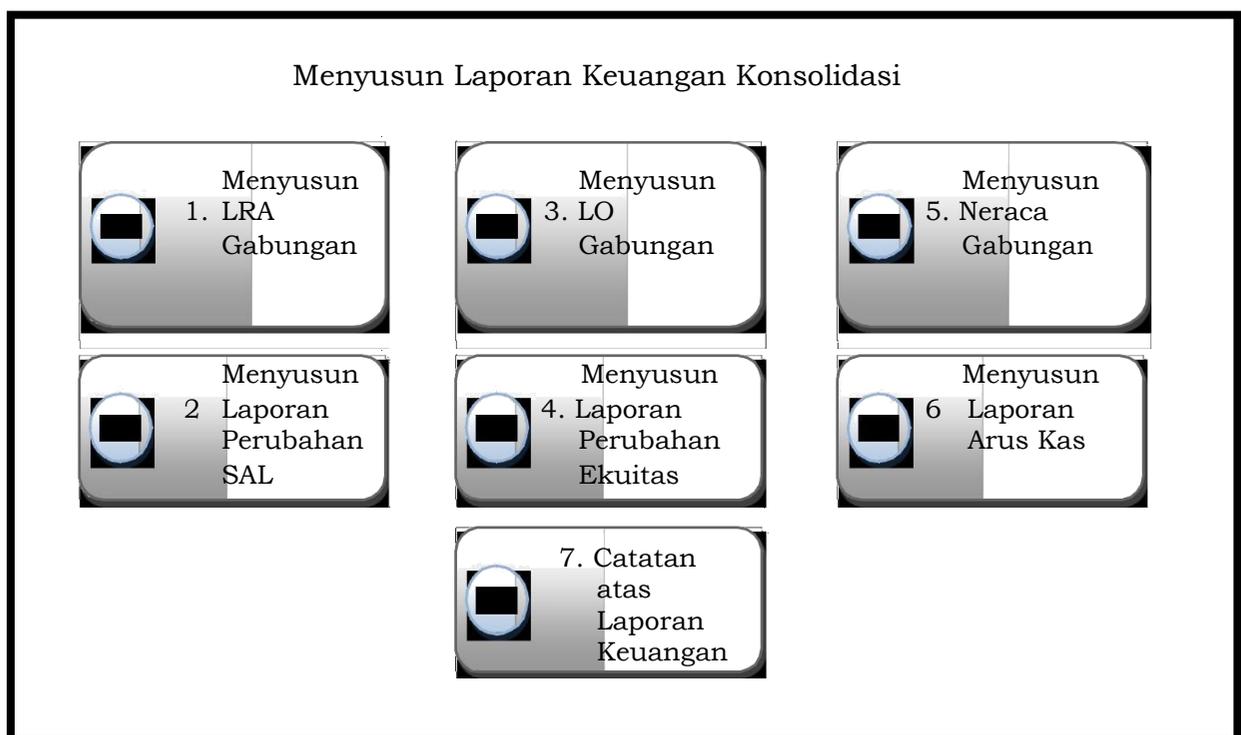
D. JURNAL PENUTUPAN.

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.

E. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Berikut dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut.

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode akun 4 (Pendapatan), 5 (Belanja), dan 6 (Pembiayaan) pada *worksheet* yang telah di gabungkan.
2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA/SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA.
3. Penyusunan Laporan Operasional.
Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode akun 7 (Pendapatan – LO) dan 8 (Beban).
4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.
5. Penyusunan Neraca.
Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari *Worksheet* konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode akun 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk akun *reciprocal* RK-SKPD dan RK-PPKD.
Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan SPPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses *offset* Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian di dalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.
6. Membuat Laporan Arus Kas.
Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
 - a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO